



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk mendapatkan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah di Kabupaten Garut dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan.
9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
10. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan perangkat Daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan IKU untuk pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dilakukan untuk:
 - a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
- (3) Penetapan IKU Perangkat Daerah dilakukan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.
- (2) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan transparansi untuk menghasilkan informasi yang handal.

Pasal 5

Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU, Bupati menugaskan Inspektorat untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 13 - 11 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 13 - 11 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 59



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
TUJUAN 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas					
1	Meningkatnya akses dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks kesalehan sosial masyarakat	Kategori	<p>Hasil survei indeks kesalihan sosial dengan kategori baik (skor>60) dan kurang (skor<60). Ditetapkan dengan 10 (sepuluh) Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberi; 2. peduli; 3. menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan; 4. tidak memaksakan nilai; 5. tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda; 6. keterlibatan dalam demokrasi; 7. keterlibatan dalam perbaikan kinerja pemerintahan (<i>Good governance</i>); 8. mencegah kekerasan, 9. konservasi lingkungan, dan 10. restorasi lingkungan. <p>Sumber: Kajian Indeks Kesalehan Masyarakat - KEMENAG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang hingga akhir hayatnya.	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	a. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan
		b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	a. Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan	Dinas Sosial
		b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	(Jumlah Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk) x 100% Garis Kemiskinan menggambarkan batas kecukupan pengeluaran/konsumsi yang direfleksikan melalui besaran rupiah minimal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Sumber Data BPS	Dinas Sosial
6	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		b. Indeks Pembangunan Gender	Poin	Mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TUJUAN 2: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif					
7	Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rp.	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Sumber: PERMENDAGRI 86 Tahun 2017	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan perekonomian daerah	a. Laju pertumbuhan sektor pertanian b. Laju pertumbuhan sektor perdagangan c. Laju pertumbuhan sektor pariwisata d. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	Laju pertumbuhan sektor pertanian diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan per lapangan usaha. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB per Lapangan Usaha pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.	Dinas Pertanian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. 000	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; • Dinas Koperasi dan UKM • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Perikanan dan Peternakan • Dinas Pertanian
10	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Sumber: PERMENDAGRI 86 Tahun 2017	Dinas Ketahanan Pangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
TUJUAN 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
11	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Ekonomi	Persentase kemantapan jalan kabupaten dan poros desa	%	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan keseluruhan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Luas Areal Daerah Irigasi Yang Terlayani Oleh Jaringan Irigasi	%	Persentase Luas lahan sawah fungsional yang merupakan bagian dari luas potensial yang telah dilayani dengan jaringan jaringan irigasi tersier sehingga jaringan irigasi yang sudah ada berfungsi untuk mengairi lahan sawah yang masuk dalam wilayah pelayanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase kawasan permukiman layak huni	%	Persentase Kawasan Permukiman Layak huni dibagi dengan luas kawasan permukiman secara keseluruhan dikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Cakupan air minum layak	%	(Jumlah penduduk pengguna air minum di perkotaan dibagi jumlah penduduk perkotaan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan sanitasi layak	%	(Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi dibagi Jumlah total rumah tangga) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Mencerminkan Kondisi Kualitas Air, Udara dan Lahan Dengan Rumus IKLH = (IPA X 30%) + (IPU X 30%) + (ITH X 40%) Catatan: IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
13	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	<p>Risiko= Ancaman x Kerentanan Kapasitas</p> <p>Keterangan:</p> <p>Risiko = Potensi Kerugian</p> <p>Ancaman = Potensi bencana</p> <p>Kerentanan = Kesiapan menghadapi bahaya bencana Kapasitas = Aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Meningkatnya pemerataan pembangunan perdesaan	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	(Jumlah desa mandiri dan maju dibagi jumlah total desa di kabupaten Garut) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TUJUAN 4: Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas					
15	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	<p>IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur Total unsur yang terisi dimana:</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang= Jumlah bobot = 1 = 0,071</p> <p>Jumlah unsur 14</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p>	Sekretariat Daerah
		b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		c. Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	Predikat penilaian SAKIP Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Inspektorat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		d. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Predikat penilaian LPPD Kabupaten	Sekretariat Daerah
		e. Indeks SPBE	Nilai	Nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		f. Indeks Sistem merit	Nilai	Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Badan Kepegawaian dan Diklat
		g. Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Nilai	Instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. IKK menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) terkait program/area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		h. Indeks Inovasi Daerah	Nilai	<p>Sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
A. DINAS PENDIDIKAN					
1	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	a. Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	$(\text{Jumlah Siswa}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 2-6 tahun}) \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
		b. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	%	$(\text{Jumlah Siswa usia 7 -12 tahun}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}) \times 100\%$	Bidang Sekolah Dasar (SD)
		c. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	%	$(\text{Jumlah Siswa usia 13 -15 tahun}) / (\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun}) \times 100\%$	Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
		d. Persentase PAUD dan Lembaga Pendidikan Masyarakat Terakreditasi minimal C	%	$(\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)}) / (\text{Jumlah PAUD pada kabupaten bersangkutan}) \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
			%	$(\text{Jumlah Lembaga PKBM Terakreditasi}) / (\text{Jumlah Lembaga PKBM pada kabupaten bersangkutan}) \times 100\%$	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		e. Persentase Pendidikan Dasar (SD & SMP) Terakreditasi minimal B	%	(Jumlah SD Terakreditasi)/(Jumlah SD pada kabupaten bersangkutan) x 100%	Bidang Sekolah Dasar (SD)
			%	(Jumlah SMP Terakreditasi)/(Jumlah SMP pada kabupaten bersangkutan) x 100%	Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
		f. Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Bahasa dan Sastra"	%	(Jumlah Satuan Pendidikan yang mengembangkan Bahasa dan Sastra)/(Jumlah Satuan Pendidikan pada kabupaten bersangkutan) x 100%	Bidang Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
2	Meningkatnya partisipasi penduduk usia I (kategori/kewenangan pendidikan masyarakat di Kabupaten) pada jenjang pendidikan menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	(jumlah siswa kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan) / (Jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada kabupaten bersangkutan) x 100%	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
B. DINAS KESEHATAN					
1	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu	Rasio puskesmas dan pustu terintegrasi terhadap jumlah penduduk (minimal 1:16.000)	Rasio	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang sudah terintegrasi layanan primer di Kabupaten Garut pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Sumber Daya Kesehatan (SDK), dan Pengendalian Pencegahan Penyakit (P2P)
		Rasio jumlah bed perawatan terhadap jumlah penduduk (1:1000)	Rasio	Jumlah Bed yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) di Kabupaten Garut pada kurun waktu tertentu di bagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Bidang Yankes , UOBK Dan UPT
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indikator pelayanan publik (IPP)	Poin	Rekapitulasi nilai capaian indikator pelayanan publik (IPP) di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.	Sekretariat , UOBK dan UPT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB															
1	2	3	4	5	6															
C. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
1	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	4 Komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah diberi nilai bobot (Predikat A, dengan bobot Nilai <80-90 , Interpretasi : Memuaskan)	Sekretariat															
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Serta Fungsi dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Nilai Anugerah Parahita Eka Praya (APE)	Poin	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">4 Komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi)</td> </tr> <tr> <td>Kategori/Poin</td> <td>Pratama (600)</td> <td>Madya (700-800)</td> <td>Utama (900)</td> <td>Mentor (1000)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pemenuhan Nilai 3 Indikator, Pelembagaan PUG, Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan,</td> </tr> </table>	4 Komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi)					Kategori/Poin	Pratama (600)	Madya (700-800)	Utama (900)	Mentor (1000)	Pemenuhan Nilai 3 Indikator, Pelembagaan PUG, Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan,					Bidang Pemberdayaan Perempuan
4 Komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi)																				
Kategori/Poin	Pratama (600)	Madya (700-800)	Utama (900)	Mentor (1000)																
Pemenuhan Nilai 3 Indikator, Pelembagaan PUG, Penyelenggaraan PUG dalam pembangunan,																				
D. DINAS SOSIAL																				
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan	%	(Jumlah Kelompok rentan yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar / jumlah kelompok rentan) x 100%	Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial															
2	Meningkatnya pemberdayaan PPKS dan PSKS	Persentase PPKS dan PSKS yang diberdayakan	%	(Jumlah PPKS dan PSKS yang diberdayakan/jumlah PPKS dan PSKS yang ada) x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial															
3	Meningkatnya perlindungan jaminan sosial bagi PPKS	Persentase pemenuhan potensi sumber kesejahteraan sosial	%	(Jumlah PPKS dan PSKS yang menerima perlindungan jaminan sosial/ jumlah PPKS dan PSKS yang ada) x 100%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Penanganan Fakir Miskin															
4	Meningkatnya kualitas pemenuhan tata kelola layanan pemerintahan	Persentase kualitas pemenuhan tata kelola layanan pemerintahan	Nilai	kualitas pemenuhan tata kelola layanan pemerintahan	Sekretariat															
			Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat															
E. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																				
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja yang Kompeten	%	Persentase Pencari Kerja yang Kompeten Tahun n dikurangi Persentase Pencari Kerja yang Kompeten Tahun n-1 (*persentase pencari kerja yang kompeten = pencari kerja terdaftar yang dilatih : seluruh pencari kerja terdaftar x 100%)	Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Transmigrasi															

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Pelindungan Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Tahun n dikurangi Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Tahun n-1 (*persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100%)	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga kerja
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja (%)	%	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tahun n dikurangi Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tahun n-1 (*persentase penempatan tenaga kerja = jumlah pencari kerja yang ditempatkan : pencari kerja terdaftar x 100%)	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat
F. DINAS PERTANIAN					
1	Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	a. Produksi Padi	Ton	Jumlah Produksi Padi selama 1 (Satu) Tahun	Bidang Sarana Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan , Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
		b. produksi Jagung	Ton	Jumlah Produksi Jagung selama 1 (Satu) Tahun	
		c. Produksi Cabai	Ton	Jumlah Produksi Cabai selama 1 (Satu) Tahun	
		d. Produksi Bawang Merah	Ton	Jumlah Produksi Bawang Merah selama 1 (Satu) Tahun	
		e. Produksi kentang	Ton	Jumlah Produksi Kentang selama 1 (Satu) Tahun	
		f. Produksi Jahe	Ton	Jumlah Produksi Jahe selama 1 (Satu) Tahun	
		g. Produksi Jeruk	Ton	Jumlah Produksi Jeruk selama 1 (Satu) Tahun	
		h. Produksi Kopi	Ton	Jumlah Produksi Kopi selama 1 (Satu) Tahun	
		i. Produksi Teh	Ton	Jumlah Produksi Teh selama 1 (Satu) Tahun	
		j. Produksi Tembakau	Ton	Jumlah Produksi Tembakau selama 1 (Satu) Tahun	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
G. DINAS KETAHANAN PANGAN					
1	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	Menghitung Skor PPH dengan Mengalikan antara Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan dengan Bobot setiap Kelompok Pangan	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	Menghitung Skor PPH dengan Mengalikan antara Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi dengan Bobot setiap Kelompok Pangan	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
H. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN					
	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Hasil Perikanan Melalui Pengelolaan Sumber daya Secara Optimal	a. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi hasil perikanan budidaya selama 1 (satu) Tahun	Bidang Perikanan Budidaya
		b. Produksi Ikan Hias	Ekor	Jumlah produksi ikan hias selama 1 (satu) Tahun	Bidang Perikanan Budidaya
		c. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap dari laut dan perairan umum daratan (PUD) selama 1 (satu) Tahun	Bidang Perikanan Tangkap
		d. Produksi olahan hasil perikanan pada kelompok Binaan	Ton	Jumlah produk olahan hasil perikanan yang diproduksi dan dipasarkan oleh kelompok binaan dalam satu tahun	Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan Berbasis Potensi Lokal	a. Produksi Hasil Peternakan	Ton	Jumlah produksi hasil peternakan (Daging, susu dan telur) selama 1 (satu) Tahun	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan
		b. Prosentase Kenaikan populasi ternak	%	Jumlah Populasi tahun n - Jumlah populasi tahun n-1 x 100%	Bidang Peternakan
		c. Penurunan Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular stategis	%	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (n) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (n-1) x 100%	Bidang Kesehatan Hewan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		d. Persentase Usaha yang memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi	%	Jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat tahun berjalan (n)- Jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat tahun sebelumnya (n-1) x 100 %	Bidang Kesehatan Hewan
		e. Bibit Ternak yang bersertifikat	Ekor	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat dalam 1 (satu) tahun	Bidang Peternakan
I. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata baik yang dikelola Pemerintah maupun yang dikelola oleh Swasta dalam kurun waktu satu tahun	Bidang Kepariwisata, Bidang Pemasaran dan Bidang Ekonomi Kreatif
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	(Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan)/(Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan)	Bidang Kebudayaan
J. DINAS KOPERASI DAN UKM					
1	Meningkatnya Kinerja Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun berjalan dibagi jumlah koperasi pada tahun berjalan	Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
2	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Ditingkatkan Daya Saingnya	%	Jumlah Usaha Mikro yang ditingkatkan daya saingnya melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha dibagi jumlah usaha mikro	Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP	Kategori	Predikat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan UKM, yang terdiri dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
K. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun (Rupiah)	Nilai Realisasi Investasi PMDN + Nilai Realisasi PMA	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bidang Pelayanan Penanaman Modal
L. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil Menengah Daerah	Persentase Pertumbuhan IKM berdaya saing	%	$((\text{Nilai Produksi Tahun ini} - \text{Nilai Produksi Tahun Lalu}) / (\text{Jumlah Tenaga Kerja Tahun ini} - \text{Jumlah Tenaga Kerja tahun lalu})) * 100$	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri dan ESDM
2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	Predikat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, yang terdiri dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Sekretariat
3	Meningkatnya Fasilitasi Perdagangan	a. Persentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi	%	$(\text{Jumlah pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarana} / \text{total jumlah pelaku perdagangan}) * 100$	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perdagangan Bidang Pengelolaan Pasar
		b. Persentase pencapaian PAD sektor perdagangan	%	$(\text{Jumlah penerimaan PAD sektor perdagangan} / \text{Target penerimaan PAD}) * 100$	Bidang Pengelolaan Pasar
		c. Pasar Tertib Ukur	%	$(\text{Jumlah pasar tertib ukur yang terbentuk} / \text{Jumlah pasar binaan}) * 100$	Bidang Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		d. Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang melakukan ekspor	%	((Jumlah pelaku usaha yang sudah ekspor tahun ini – Jumlah pelaku usaha yang ekspor tahun lalu) / Jumlah pelaku usaha yang ekspor tahun lalu)*100	Bidang Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan
		e. Persentase Pelaku Usaha (UMKM dan IKM) terfasilitasi layanan P3DN	%	(Jumlah Pelaku usaha yang terfasilitasi layanan P3DN/Jumlah Pelaku Usaha)*100	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri • Bidang Sarana Prasarana PEMBERDAYAAN Industri dan ESDM
4	Meningkatnya Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Persentase perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi yang berizin	%	(Jumlah perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi yang berizin/Jumlah total perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi)*100	Bidang Sarana Prasarana PEMBERDAYAAN Industri dan ESDM
M. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Meningkatnya kualitas penyenggaraan jalan	Persentase kemantapan jalan	%	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/Total panjang jalan x 100%	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan air minum layak	%	Jumlah jiwa yang terlayani air minum/Jumlah total jiwa x 100%	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	Cakupan sanitasi layak	%	Jumlah rumah tangga terlayani sanitasi/Jumlah total rumah tangga x 100%	Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan irigasi dan konservasi Sumber Daya Air	Persentase luas areal yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	Luas areal yang terlayani jaringan irigasi/Total luas areal irigasi x 100%	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase tampungan air yang tersedia	%	Jumlah tampungan air yang tersedia/Target tampungan air tersedia x 100%	Bidang Sumber Daya Air

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase luas genangan di wilayah perkotaan yang tertangani	%	Luas genangan yang tertangani/Target penanganan genangan x 100%	Bidang Sumber Daya Air
6	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi	%	Jumlah bangunan gedung yang layak teknis dan fungsi/Total bangunan gedung x 100%	Bidang Bangunan
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	Jumlah bangunan, lingkungan dan kawasan strategis yang tertata/Target penataan bangunan, lingkungan dan kawasan strategis x 100%	Bidang Bangunan
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat/Jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat x 100%	Bidang Jasa Konstruksi
		Persentase proyek tanpa kecelakaan konstruksi	%	Jumlah proyek tanpa kecelakaan konstruksi/Jumlah proyek yang diawasi x 100%	Bidang Jasa Konstruksi
9	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	Luas wilayah yang penggunaannya sesuai tata ruang/Total luas wilayah yang seharusnya berdasarkan tata ruang x 100%	Bidang Penataan Ruang
N. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1	Meningkatnya Hunian Dengan Prasarana Sarana dan Utilitas yang memadai	Cakupan Luasan Permukiman Kumuh	ha	Luas kawasan kumuh pada tahun N - 1 dikurangi luas kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tertangani pada tahun N	Bidang Kawasan Permukiman
		Luas Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan PSU yang representatif	ha	Total luasan lokasi/wilayah yang terbangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun N	Bidang Kawasan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Jumah PSU Perumahan yang diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	Perumahan	Jumlah Perumahan yang melakukan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun N	Bidang Perumahan
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	unit	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun N	Bidang Perumahan
		Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana dan terdampak Program Pemerintah	%	Jumlah penanganan Rumah Korban Bencana pada tahun N dibandingkan dengan Jumlah Rumah Terdampak Bencana dan Terdampak Program Pemerintah di tahun yang sama	Bidang Perumahan
2	Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Bidang Pertanahan	Persentase penanganan kasus tanah negara	%	Jumlah penanganan kasus pertanahan dibandingkan dengan jumlah kasus pertanahan yang ada pada tahun yang sama	Bidang Pertanahan
O. DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	<p>IKLH Kab = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)</p> <p>a. IKA</p> $\text{IKA Kabupaten} = \frac{\sum_i^n \text{IKA Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ $\text{IKA Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ <p>W = Faktor Pembobot I = Sub - Indeks</p> <p>b. IKU</p> $\text{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ <p>I_{INA} = Rata-Rata Indeks NO₂ + Indeks SO₂ + Indeks PM_{2,5} Indeks NO₂ = Rata-rata NO₂ / Baku Mutu INA NO₂ (50 µg/m³) Indeks SO₂ = Rata-rata SO₂ / Baku Mutu INA SO₂ (45 µg/m³) Indeks PM_{2,5} = Rata-rata PM_{2,5} / Baku Mutu INA PM_{2,5} (15 µg/m³)</p>	Bidang Tata Lingkungan Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				c. IKL $IKL = 100 - [84,3 - (TL \times 100) \times \frac{50}{54,3}]$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$	
		b. Tingkat Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengelolaan Sampah = Jumlah sampah terkelola/Jumlah sampah total Administratif x 100%	Bidang Pengelolaan Persampahan
P. DINAS PERHUBUNGAN					
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi dengan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	a. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan X 100%	Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana
		b. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah perlengkapan jalan yang dibutuhkan X 100%	Upt PJU
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan sarana pelayaran dan pengelolaan perkeretaapian	a. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	%	Jumlah angkutan umum yang tersedia dibagi jumlah angkutan umum yang dibutuhkan X 100%	Bidang Angkutan
		b. Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan	%	Jumlah penyuluhan, sosialisasi dan peralatan keselamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah penyuluhan, sosialisasi dan peralatan keselamatan yang dibutuhkan X 100%	Bidang Keselamatan Pelayaran Dan Perkeretaapian
		c. Tingkat laik layar sarana pelayaran	%	Jumlah pengawasan terhadap kapal layar <7GT yang dilaksanakan dibagi jumlah pengawasan terhadap kapal layar <7GT yang dibutuhkan X 100%	Bidang Keselamatan Pelayaran Dan Perkeretaapian
		d. Tingkat pengelolaan perkeretaapian	%	Jumlah pengelolaan perkeretaapian yang dilaksanakan dibagi Jumlah pengelolaan perkeretaapian yang dibutuhkan X 100%	Bidang Keselamatan Pelayaran Dan Perkeretaapian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Q. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / jumlah penduduk	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / jumlah korban bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Presentase pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	Jumlah kegiatan penanggulangan pasca bencana / jumlah kejadian bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
R. DINAS PEMADAM KEBAKARAN					
1	Meningkatnya layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Persentase layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%	Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah X 100 dibagi Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X	Bidang Operasi & penyelamatan Bidang Pencegahan Kebakaran
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	%	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran X 100 dibagi Jumlah yang terlayani pada tahun berjalan	Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
S. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik.	Meningkatnya Tatakelola Kepemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	$\Sigma(\text{jawaban} \times \text{bobot})/\Sigma \text{ pertanyaan}$	Bidang Bidang Aplikasi dan Informatika
2	Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik.	Meningkatnya Tatakelola Kepemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	$\Sigma(\text{jawaban} \times \text{bobot})/\Sigma \text{ pertanyaan}$	Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3	Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik.	Meningkatnya Tatakelola Kepemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	$\Sigma(\text{jawaban} \times \text{bobot})/\Sigma \text{ pertanyaan}$	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
4	Cakupan Penyebarluasan informasi dan komunikasi di Kabupaten Garut	prosentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat	%	$(\text{Komponen Informasi publik} + \text{Komunikasi publik})/2 \times 100\%$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
T. INSPEKTORAT					
1	Meningkatnya tata kelola Pengawasan Intern	Nilai/Level Kapabilitas APIP	Poin	$\Sigma \text{ Capaian Kinerja Dukungan Pengawasan} + \text{Aktivitas Pengawasan}$	Inspektur Pembantu III
2	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai/Level Maturitas SPIP	Poin	$\Sigma \text{ Capaian Nilai Penetapan Tujuan} + \text{Struktur dan Proses} + \text{Pencapaian Tujuan SPIP}$	Inspektur
3	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko	Nilai/Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Poin	$\Sigma \text{ Capaian Nilai Perencanaan} + \text{Kapabilitas} + \text{Hasil Manajemen Risiko}$	Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, Irban Investigasi dan pengaduan
4	Meningkatnya Sistem Pengendalian Tindak Pidana Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Poin	$\Sigma \text{ Capaian Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi} + \text{Penerapan Strategi Pencegahan} + \text{Penanganan Kejadian Korupsi}$	Irban Investigasi dan pengaduan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
U. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	a. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah untuk Komponen Perencanaan Kinerja.	Nilai	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut untuk Komponen Perencanaan Kinerja, yang terdiri dari Sub-komponen Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang PSDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang PPED
		b. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah untuk Komponen Pengukuran Kinerja.	Nilai	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut untuk Komponen Pengukuran Kinerja, yang terdiri dari Sub-komponen Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang PSDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang PPED
2	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	(Jumlah Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah) / (Jumlah Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah) x 100%	Bidang Penelitian dan Pengembangan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda	Kategori	Predikat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Sekretariat
V. SEKRETARIAT DAERAH					
1	Meningkatnya Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintahan	Persentase aktifitas keagamaan yang difasilitasi	%	(Jumlah kebijakan keagamaan lingkup sosial dan kemasyarakatan yang diterbitkan dibagi dengan jumlah Regulasi kebijakan keagamaan lingkup sosial dan kemasyarakatan yang dibutuhkan) X 100%.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesejahteraan Rakyat • Bagian Hukum • Bagian Kerjasama
2	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	a. Nilai LPPD	Nilai	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Evaluasi atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD.	Bagian Tata Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		b. Persentase kualitas kebijakan dan koordinasi pembangunan	%	Jumlah kebijakan dan kordinasi pembangunan yang dilaksanakan x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Perekonomian • Bagian Administrasi Pembangunan • Bagian Pengadaan Barang dan Jasa • Bagian Sumber Daya Alam
		c. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Yang dinilai berdasarkan Indeks Rreformasi Birokrasi.	Bagian Organisasi
		d. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada SKPD Dan Unit Kerja	Nilai	<p>IKM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur Total unsur yang terisi.</p> <p>Dimana: Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = 1 = 0,071, Jumlah unsur 14.</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>SKM Unit pelayanan x 25</p> <p>Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menambah unsur yang dianggap relevan; b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1 	Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Tabel II Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	
				NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)
				NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)
				KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	
				1	1,00 – 2,5996
				25,00 – 64,99	D
				2	2,60 – 3,064
				65,00 – 76,60	C
				3	3,0644 – 3,532
				76,61 – 88,30	B
				4	3,5324 – 4,00
				88,31 – 100,00	A
		e. Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	Jumlah Pelayanan Internal dibagi Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH) X 100%	
				<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Umum • Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan • Bagian Perencanaan dan Keuangan 	
W. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
1	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat DPRD yang baik dan bersih	Nilai evaluasi AKIP	Predikat (Nilai)	Lima komponen penilaian SAKIP memenuhi kriteria baik oleh inspektorat	Sekretariat
2	Meningkatnya dukungan sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD	Presentase penyusunan perda yang difalitasi	%	(Jumlah penyusunan perda yang difasilitasi/jumlah penyusunan perda yang diusulkan dalam propemperda) X 100	Bagian Persidangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
X. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase Perangkat Daerah yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	(Jumlah Perangkat Daerah dengan penyelesaian perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP dibanding jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100 %	Bidang Anggaran
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	(Realisasi Belanja Daerah/Total Belanja Daerah) x100%	Bidang Perbendaharaan
		Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	(Data Aset di Lapangan/Data Inventaris Barang) x100%	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Sekretariat
Y. BDAN PENDAPATAN DAERAH					
1	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	((Realisasi PDRB tahun n - Realisasi PDRB tahun n-1)/realisasi n-1) x 100%	Bidang Penagihan, Bidang pendataan, Bidang teknologi dan informasi, Bidang pengawasan & pemeriksaan,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB																									
1	2	3	4	5	6																									
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bapenda	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bapenda	Nilai	<p>(Total nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi)x nilai penimbang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Bidang pendataan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										
Z. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT																														
1	Penguatan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit	Nilai Sistem Merit	Nilai	<p>Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN, dengan Metode Penilaian berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penilaian Sistem Merit Pasal 22 ayat (2). Penilaian Mandiri dilakukan berdasarkan aspek dengan bobot sebagai berikut :</p> <p>a. Perencanaan Kebutuhan sebesar 10%;</p> <p>b. Pengadaan sebesar 10%;</p> <p>c. Pengembangan karier sebesar 30%;</p> <p>d. Promosi dan mutasi sebesar 10%;</p> <p>e. Manajemen kinerja sebesar 20%;</p> <p>f. Penggajian penghargaan dan disiplin sebesar 10%;</p> <p>g. Perlindungan dan pelayanan sebesar 4%; dan</p> <p>h. Sistem informasi sebesar 6%</p>	Bidang Pengembangan Kompetensi, Bidang Pengembangan Karier, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi																									

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Tingkat Penerapan Sistem Merit: 1. Kategori IV, nilai 325 - 400, dengan indeks 0,81- 1, sebutan Sangat Baik; 2. Kategori III, nilai 250 - 324, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan Baik; 3. Kategori II, nilai 175 - 249, dengan indeks 0,41 - 0,6, sebutan Kurang; 4. Kategori I, nilai 100 - 174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan Buruk.	
2	Mewujudkan BKD yang berkinerja tinggi dan Akuntabel	Nilai Implementasi SAKIP BKD	Nilai	Hasil Evaluasi APIP dengan Lembar Kerja Evaluasi meliputi 4 (Empat) Komponen, dengan bobot sebagai berikut: 1. Komponen Perencanaan Kinerja, Total Bobot 30; 2. Komponen Pengukuran Kinerja, Total Bobot 30; 3. Komponen Pelaporan Kinerja, Total Bobot 15; 4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Total Bobot 25. Total Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 Predikat: 1. A (Nilai > 80 -90); 2. BB (Nilai > 70 - 80); 3. B (Nilai > 60 - 70); 4. CC (Nilai > 50 - 60); 5. C (Nilai > 30 - 50); 6. D (Nilai > 0 - 30).	Sekretariat
AA. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	Jumlah desa maju dan desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun dibagi jumlah desa maju dan desa berkembang (per awal tahun n) dikali 100	Bidang Penataan Desa, Bidang Kerjasama Desa, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat
BB. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
1	Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan kecerdasan (literasi) masyarakat	Jumlah Pemustaka dalam satu tahun	Orang	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dalam periode selama 1 (Satu) Tahun	Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Bidang Koleksi Nusantara dan Naskah Kuno
2	Meningkatnya penerapan standar baku Kearsipan	Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	(Jumlah Perangkat daerah yang tertib arsip/ Jumlah Perangkat Daerah) \x 100%	Bidang Pengelolaam Arsip dan Nidang Penyelamatan dan Perlindungan Arsip
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sekretariat
CC. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten, Capaian keluaran kinerja pelayanan dokumen lainnya	a. Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	%	(Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP/Jumlah penduduk 17 tahun keatas)X100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		b. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA/Jumlah anak usia 0-17 tahun) x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		c. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	(Jumlah aktivasi IKD (identitas kependudukan digital)/jumlah perekaman e-KTP) x100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		d. Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%	(Jumlah anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki akta lahir/Jumlah anak usia 0-17 tahun) x 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		e. Kepemilikan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Desa/Kelurahan/Pemakaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya	%	(Jumlah (desa/kelurahan/pemakaman umum/pemakaman keluarga) yang sudah memiliki buku poko pemakaman/Jumlah (desa/kelurahan/pemakaman umum/pemakaman keluarga)) x100%	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		f. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	Mitra	Jumlah Mitra yang sudah melakukan kerjasama pemanfaatan KIA	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		g. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	OPD	Jumlah OPD yang sudah melakukan kerjasama pemanfaatan data	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		h. Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	OPD	Jumlah OPD yang sudah melakukan kerjasama akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		i. Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Buku	Ada/tidak ada	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		j. Keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya	Laporan	Jumlah laporan 20 layanan dokumen adminduk	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dalam penyelenggaraan Adminduk	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil	Kategori	Nilai komponen perencanaan kinerja + nilai komponen pengukuran kinerja + nilai komponen pelaporan kinerja + nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sekretariat
DD. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOLPP dikali 100%	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perda dan Perkada

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		b. Persentase Penegakan PERDA/PERKADA	%	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA/PERKADA dibagi Jumlah Pengaduan Pelanggaran PERDA/PERKADA dikali 100%	Bidang Penegakan Perda dan Perkada
		c. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	Persentase linmas aktif dan terlatih dibagi jumlah keseluruhan anggota linmas di kali 100%	Bidang Perlindungan Masyarakat
2	Meningkatnya kinerja aparaturnya Satpol PP dalam penyelenggaraan trantibum linmas	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat (Nilai)	Nilai hasil evaluasi SAKIP SatpolPP	Sekretariat
EE. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
1	Meningkatnya Indeks Layanan Kepemudaan	a. Peningkatan Layanan Kepemudaan	%	(Layanan Pemuda yang Terlayani/ Jumlah Layanan Pemuda) x 100 %	Bidang Pengembangan pemuda
		b. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	(Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif/ Jumlah Organisasi Pemuda) x 100 %	Bidang Pengembangan pemuda
		c. Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	%	(Jumlah Penduduk yang Berolahraga dalam 1 Minggu/ Jumlah Penduduk) x 100 %	Bidang Daya Saing Keolahragaan
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Olahraga	a. Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Orang	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat dan tingkat Nasional dalam 1 Tahun	Bidang Daya Saing Keolahragaan
		b. Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Prasarana Keolahragaan	Desa	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Prasarana Keolahragaan	Bidang Daya Saing Keolahragaan
3	Terwujudnya gerakan pramuka yang berkarakter cakup, berdaya saing dan mandiri	Persentase SDM Kepramukaan yang telah mendapatkan pendidikan dasar kepramukaan	%	(Jumlah SDM Kepramukaan yang telah Mengikuti Pendidikan Dasar Kepramukaan/ Jumlah SDM Kepramukaan) x 100 %	Bidang Kepramukaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB																									
1	2	3	4	5	6																									
FF. KECAMATAN																														
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	<p>(Total nilai persepsi perunsur/total unsur yang terisi)x nilai penimbang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (x)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Kecamatan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	<p>Dihitung berdasarkan hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Kompetensi SDM Kecamatan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan Anggaran Kecamatan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Keberadaan Data Pendukung Lainnya</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Bobot	Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30	Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan	20	Kompetensi SDM Kecamatan	5	Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5	Keberadaan Data Pendukung Lainnya	5	Kecamatan											
Parameter	Bobot																													
Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35																													
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30																													
Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan	20																													
Kompetensi SDM Kecamatan	5																													
Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5																													
Keberadaan Data Pendukung Lainnya	5																													
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	<p>Dihitung berdasarkan presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan rumus : (Jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang/jumlah peserta yang diundang)x100%</p>	Kecamatan																									

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB												
1	2	3	4	5	6												
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat (Nilai)	<p>Dihitung berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintahan</p> <table border="1" data-bbox="1183 394 1971 1263"> <thead> <tr> <th data-bbox="1183 394 1373 427">Predikat</th> <th data-bbox="1373 394 1971 427">Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1183 427 1373 516"></td> <td data-bbox="1373 427 1971 516">berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1183 516 1373 743">B (Nilai > 60 – 70)</td> <td data-bbox="1373 516 1971 743">Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1183 743 1373 906">CC (Nilai > 50 – 60)</td> <td data-bbox="1373 743 1971 906">Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1183 906 1373 1068">C (Nilai > 30 – 50)</td> <td data-bbox="1373 906 1971 1068">Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1183 1068 1373 1263">D (Nilai > 0 – 30)</td> <td data-bbox="1373 1068 1971 1263">Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</td> </tr> </tbody> </table>	Predikat	Interpretasi		berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.	B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.	CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.	C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.	D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.	Kecamatan
Predikat	Interpretasi																
	berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.																
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.																
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.																
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.																
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.																

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
GG. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Memperkuat pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan	%	(jumlah masyarakat yang memahami nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan)/(jumlah total masyarakat yang mengikuti pembinaan) x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi	%	(jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam proses demokrasi)/(jumlah total masyarakat yang memiliki hak pilih) x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan
3	Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Tingkat kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan program-program pembangunan	%	(jumlah organisasi kemasyarakatan yang mampu mengembangkan program-program pembangunan)/(jumlah total organisasi kemasyarakatan yang terdaftar) x 100%	Bidang Ketahanan Bangsa
4	Memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi daerah	Tingkat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi daerah	%	(jumlah kecamatan yang menunjukkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya)/(jumlah total kecamatan) x 100%	Bidang Ketahanan Bangsa
5	Memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	Tingkat kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi terkini tentang potensi ATHG	%	(jumlah kerjasama dengan instansi terkait)/(jumlah total instansi yang relevan) x 100%	Bidang Kewaspadaan Dini Daerah
6	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja	%	(jumlah pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel)/(jumlah total pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja) x 100%	Sekretariat

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

